

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB sebagai respons terhadap krisis global yang disebabkan oleh epidemi HIV/AIDS. UNAIDS didirikan pada Desember 1994 dan mulai menjalankan program kerjanya di 1 Januari 1996 (UNAIDS, 2021). UNAIDS memimpin upaya global untuk mengakhiri AIDS yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 sebagai bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejak kasus pertama HIV dilaporkan lebih dari 35 tahun yang lalu, 78 juta orang meninggal karena penyakit terkait AIDS. UNAIDS menyediakan panduan strategis, melakukan advokasi, mengoordinasikan, dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk mendorong dan menghubungkan kepemimpinan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyediakan layanan HIV yang dapat menyelamatkan nyawa. Tanpa adanya UNAIDS, tidak akan ada visi strategis dalam upaya penanggulangan AIDS (UNAIDS, 2021). UNAIDS memiliki visi tidak ada infeksi HIV baru, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada kematian terkait HIV. Sedangkan misi UNAIDS adalah memimpin, memperkuat, dan mendukung respons yang memadai dalam merespon epidemi HIV/AIDS (UNAIDS, 2021).

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, yang berfungsi melawan infeksi. Virus ini dapat melemahkan kemampuan sistem imun sehingga individu menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jika penyakit HIV tidak diobati, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yang merupakan tahap akhir dari infeksi HIV dimana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi atau penyakit lainnya (UNAIDS, 2023). HIV dapat dicegah dan diobati dengan terapi antiretroviral atau *antiretroviral therapy* (ART) (WHO, 2024). Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati HIV/AIDS disebut obat antiretroviral (ARV), yang bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4 (Pittara, 2023). Terapi antiretroviral ini berarti mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat seperti atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir, ritonavir, tipranavir, dolutegravir, efavirenz, nevirapine, dan lain sebagainya (Spiritia, 2021).

Terapi antiretroviral adalah pengobatan yang direkomendasikan untuk semua orang yang terinfeksi HIV. ART tidak bisa menyembuhkan HIV, tapi obat-obatan HIV dapat membantu pengidap HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. ART juga dapat mengurangi risiko penularan HIV. ART biasanya dikombinasikan dengan tiga atau lebih obat dari beberapa kelas obat berbeda. Setiap kelas obat dapat memblokir virus dengan cara yang berbeda dengan tujuan memperhitungkan resistensi obat individu serta menghindari terbentuknya jenis HIV baru yang resisten terhadap obat (Makarim, 2021).

HIV/AIDS menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan di dunia, terutama di Afrika Selatan, yang memiliki salah satu prevalensi HIV tertinggi. Menurut data yang diberikan oleh Pemerintah Afrika Selatan, tingkat prevalensi HIV secara keseluruhan di pertengahan 2024 sekitar 12,7% di antara penduduk Afrika Selatan. Jumlah total orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) diperkirakan sekitar 8,0 juta pada tahun 2024. Untuk orang dewasa berusia 15-49 tahun diperkirakan 16,7% dari populasi positif HIV (Sithole, 2024). Untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan terkait HIV di antara populasi yang sangat rentan ini, tes dan pengobatan dini sangatlah penting. Tanpa akses terhadap tes dan pengobatan, 50% anak-anak dengan HIV akan meninggal pada usia 2 tahun, dan 80% tidak akan bertahan hidup sampai usia 5 tahun (WHO, 2024).

Penularan HIV dapat melalui berbagai cara yakni melalui cairan tubuh seperti cairan vagina atau cairan semen, air susu ibu, dan darah. Selain itu, HIV juga dapat ditularkan dari proses kehamilan yaitu pada saat bayi masih berada di dalam rahim dan pada saat persalinan. Kegiatan seperti berpegang tangan, berciuman ataupun berpelukan tidak dapat menularkan virus HIV (WHO, 2021).

Sebagian besar orang yang terinfeksi di wilayah Afrika Selatan disebabkan saat melakukan hubungan heteroseksual tanpa pengaman. Hal ini merupakan faktor terbesar untuk terinfeksi HIV di wilayah Afrika Selatan. Selain itu, penyebab lainnya adalah penggunaan narkoba dengan jarum suntik. Akibat dari penyebaran epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan ini dirasakan langsung oleh seluruh individu. Tingginya tingkat penyebaran penyakit ini menjadikan

HIV/AIDS sebuah ancaman bagi kehidupan manusia serta berpengaruh terhadap *human security* (keamanan manusia). Penyebaran penyakit HIV/AIDS di Afrika Selatan akan berdampak pada bidang ekonomi Afrika Selatan yaitu berkurangnya pasokan tenaga kerja yang membuat produktivitasnya berkurang. Pendapatan pemerintah juga akan menurun, karena pendapatan pajak turun, dan pemerintah ditekan untuk meningkatkan pengeluaran karena meningkatnya prevalensi AIDS sehingga menciptakan potensi krisis fiskal (Dixon, McDonald, & Roberts, 2002). Oleh sebab itu, jika angka penderita HIV/AIDS di Afrika Selatan terus naik dari tahun ke tahun, hal ini akan menurunkan tingkat *human security* di Afrika Selatan di berbagai bidang (Rahmawati, 2017).

Di Afrika Selatan, ada fokus yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengobatan HIV, khususnya dikalangan remaja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendidik kaum muda di masyarakat pedesaan mengenai pentingnya untuk mengetahui status HIV mereka dan mengakses terapi antiretroviral, yang sangat penting untuk mengelola virus dan mencegah penyebarannya. Eastern Cape sebagai provinsi pertama di Afrika Selatan yang memulai kampanye U=U (*undetectable = untransmittable*) kesadaran publik. Kampanye ini bertujuan untuk memotivasi individu yang hidup dengan HIV untuk memulai, melanjutkan, atau melanjutkan pengobatan mereka, kemudian memastikan mereka mencapai dan mempertahankan viral load yang tidak terdeteksi. Kampanye ini dirancang untuk membantu provinsi tersebut mengejar ketertinggalan dan mencapai target HIV tahun 2020, dimana seharusnya 73% dari seluruh individu yang hidup dengan HIV telah mencapai penekanan virus pada

tahun tersebut. Pada tahun 2020, Eastern Cape hanya mencapai 58%. Target global yang baru untuk penekanan virus ditetapkan sebesar 86% pada tahun 2025 (UNAIDS, 2022).

Pemerintah Afrika Selatan berkolaborasi dengan UNAIDS meluncurkan kampanye “She Conquers” dalam menanggapi meningkatnya kerentanan perempuan muda dan gadis remaja terhadap HIV. Diperkirakan hanya seperempat anak perempuan dan sepertiga anak laki-laki yang memiliki pemahaman penuh tentang bagaimana HIV ditularkan dan dapat dicegah. “She Conquers” dirancang berdasarkan tujuan untuk menurunkan angka infeksi HIV baru, kehamilan di kalangan remaja, serta kekerasan berbasis gender di antara wanita muda dan gadis remaja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi kaum muda, terutama bagi wanita muda (UNAIDS, 2016).

Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) adalah salah satu organisasi non-pemerintah (NGO) yang menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang terkena dampak konflik, penyakit, bencana, atau pengecualian dari fasilitas kesehatan (MSF, 2024). MSF sedang bersiap untuk meluncurkan *long-acting cabotegravir* (CAB-LA) yang merupakan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV untuk *pre-exposure prophylaxis* (PrEP) di Afrika Selatan. CAB-LA yang diberikan melalui suntikan setiap dua bulan telah digambarkan sebagai pengubah situasi yang potensial dalam memerangi HIV/AIDS. Afrika Selatan dijadwalkan menerima sebagian dari 231.000 dosis CAB-LA sebelum akhir tahun (MSF, 2024). CAB-LA

direkomendasikan untuk pencegahan HIV oleh WHO pada Juli 2022 karena diperkirakan terdapat 1,3 juta infeksi HIV baru per tahun (WHO, 2022).

World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian ART pada hari yang sama saat didiagnosis HIV atau yang disebut dengan Inisiasi Terapi Antiretroviral (ART) melalui Buku Pedoman WHO. Pedoman WHO untuk mengelola HIV Lanjut menetapkan bahwa inisiasi ART harus dilakukan dalam waktu 7 hari setelah diagnosis atau idealnya pada hari yang sama (WHO, 2017). Menurut laporan terbaru UNAIDS, Global AIDS Update 2016, infeksi HIV baru menurun sebesar 14% antara tahun 2010 dan 2015 di Afrika Timur dan Selatan. Meskipun mengalami kendala ekonomi, selama periode ini, Afrika Selatan telah mengembangkan program HIV terbesar di dunia yaitu menyediakan pengobatan antiretroviral (ARV) kepada lebih dari 12 juta orang, dibandingkan dengan 11.000 orang pada tahun 2000. Untuk mencapai hasil ini, negara-negara di kawasan Afrika Selatan menggunakan beberapa pendekatan kesehatan seperti harga yang terjangkau dinegosiasikan untuk obat-obatan ARV, sistem pemberian layanan disederhanakan dan didesentralisasi, serta rantai pasokan yang kuat untuk obat-obatan ARV dan komoditas terkait HIV lainnya (UN, 2016)

Afrika Selatan mengumumkan akan menyediakan pengobatan gratis bagi semua orang yang hidup dengan HIV, terlepas dari kondisi sistem kekebalan tubuh mereka. Namun, meskipun Afrika Selatan berhasil memerangi HIV/AIDS, tantangan tetap ada. Kawasan Afrika Selatan masih menyumbang dua pertiga dari total infeksi HIV baru di dunia pada tahun 2016. UNICEF mengumumkan bahwa AIDS masih menjadi penyebab kematian nomor satu di kawasan Afrika Selatan

bagi mereka yang berusia 10-19 tahun. Meskipun terdapat kemajuan dalam upaya pencegahan, jumlah anak muda terutama anak perempuan yang lebih rentan terhadap eksploitasi oleh laki-laki yang lebih tua yang tertular HIV perlu dikurangi (UN, 2016).

Munculnya pandemi penyakit lain pada tahun 2019 menimbulkan terganggunya proses pengobatan HIV di Afrika Selatan. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia sehingga menyebabkan pandemi global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 telah membuat banyak negara di Afrika bekerja untuk meningkatkan strategi keamanan kesehatan mereka. Dampak Covid-19 yang berlebihan pada sistem kesehatan mengganggu layanan kesehatan dan memicu gangguan sosial ekonomi. Contohnya jam buka klinik yang berkurang, serta staf yang dipindahkan dari pengujian dan perawatan HIV ke aktivitas respons Covid-19 mengakibatkan terganggunya pelayanan pengobatan HIV/AIDS. (Dongoran, Sari, & Harikersa, 2024).

Permasalahan HIV/AIDS ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19, tetapi dampak dari pandemi ini telah menciptakan kesulitan baru dalam pencapaian pencegahan epidemi HIV/AIDS, termasuk adanya kebutuhan mendesak yang membutuhkan respons cepat (UNAIDS, 2021). Langkah-langkah mitigasi terhadap Covid-19 seperti larangan bepergian dan karantina wilayah nasional telah berdampak pada perawatan dan pengobatan HIV secara global. Menurut WHO, 73 negara di seluruh dunia mengalami gangguan pada program

terapi antiretroviral (ART) yang berpotensi berdampak pada 70% orang penerima terapi ART. WHO memperkirakan bahwa gangguan ART selama enam bulan dapat menyebabkan lebih dari 500.000 kematian tambahan akibat penyakit terkait AIDS pada tahun 2021 (Abdul Karim & Baxter, 2022).

Pemerintah di Afrika Selatan memprioritaskan pemberian perawatan kepada pengidap HIV dan perawatan antiretroviral yang diberikan secara gratis kepada siapa saja yang hasil tesnya positif, berapapun jumlah CD4 mereka. Pemerintah Afrika Selatan juga meningkatkan upaya untuk mendorong sunat medis pada pria, dan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang di Afrika Selatan yang aktif secara seksual berpotensi tertular HIV. Pemerintah menghimbau semua warga Afrika Selatan untuk menyadari bahwa HIV dan AIDS adalah penyakit kronis yang dapat dicegah dan diobati, dan ada pilihan yang terjangkau bagi orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) untuk menjalani hidup yang bahagia (Mokale, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) terhadap pengendalian perkembangan HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024 serta bagaimana dampak keterlibatan WHO dalam efektivitas program penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan. Pandemi Covid-19 telah mengganggu sistem kesehatan di banyak negara, termasuk Afrika Selatan, yang sebelumnya sudah berjuang melawan epidemi HIV/AIDS.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada periode waktu dari tahun 2016 hingga 2024. Cakupan geografis utama akan berfokus pada negara Afrika Selatan. Fokus penelitian akan ditujukan pada sektor kesehatan di Afrika Selatan, meliputi keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS, efektivitas program, serta perkembangan penanganan HIV/AIDS sejak 2016-2024. Kebijakan yang dianalisis mencakup kebijakan penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan dan keterlibatan organisasi internasional seperti UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS. Penelitian ini akan menekankan pada peran UNAIDS di Afrika Selatan. Analisis akan menggunakan data publik dari sumber terpercaya, dengan fokus pada bentuk keterlibatan UNAIDS, dampak keterlibatan UNAIDS, serta perkembangan penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan sejak 2016-2024.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024?
2. Bagaimana peranan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024?
3. Bagaimana dampak keterlibatan UNAIDS dalam menangani epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi perkembangan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024.
- b. Untuk mengidentifikasi peranan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024.
- c. Untuk menganalisis dampak keterlibatan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoretis : Menambah wawasan dan pemahaman tentang peran organisasi internasional, khususnya UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan.
- b. Praktis : Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas program penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan.
- c. Akademis : Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan global dan penanganan epidemi.

D. Kerangka Konseptual

“Dampak Keterlibatan The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dalam Penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan periode 2016-2024” mengharuskan kita untuk memahami bagaimana keterlibatan organisasi internasional seperti UNAIDS dalam efektivitas program pengobatan HIV/AIDS selama tahun 2016-2024 di Afrika Selatan yang mengakibatkan

terganggunya keamanan manusia. Dalam konteks ini, penelitian mengandalkan dua teori yang saling melengkapi : Teori Rezim Internasional dan Teori *Human Security*.

1. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner dalam bukunya yang berjudul “*International Regimes*”, Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai kumpulan prinsip, norma, aturan, dan keputusan yang mengatur perilaku aktor dalam suatu bidang tertentu (Krasner, 1983). Krasner menekankan bahwa rezim internasional dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik diantara negara-negara.

Menurut Robert Keohane dalam karyanya yang berjudul “*After Hegemony*”, ia menjelaskan bahwa rezim internasional adalah aturan dan norma yang mengatur interaksi antar negara dalam konteks tertentu (Keohane, 1984). Ia menekankan pentingnya institusi internasional dalam menciptakan dan mempertahankan rezim, serta bagaimana rezim dapat berfungsi untuk mengatasi masalah kolektif yang dihadapi oleh negara-negara.

Selain itu, Oran R. Young juga mendefinisikan rezim internasional dalam bukunya yang berjudul “*Governance in World Affairs*”, ia mendefinisikan rezim internasional sebagai kumpulan norma, aturan, dan prosedur yang mengatur interaksi antar negara dalam suatu isu tertentu (Young, 1999). Ia menekankan bahwa rezim internasional dapat membantu dalam mengelola masalah kolektif dan menciptakan kerjasama diantara negara-negara.

Implementasi rezim internasional merupakan proses di mana negara-negara dan organisasi internasional berkolaborasi untuk mengatur interaksi

dan perilaku di antara mereka dalam berbagai isu global. Melalui rezim ini, negara-negara dapat berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta mengatasi tantangan global (Keohane & Nye, 2001). Salah satu contoh konkret dari implementasi rezim internasional adalah UNAIDS yang berperan penting dalam mengkoordinasikan respons global terhadap masalah kesehatan. Melalui berbagai program, WHO dan UNAIDS berupaya meningkatkan kesehatan di seluruh dunia dan mengurangi beban penyakit. Keberhasilan rezim ini sangat bergantung pada komitmen negara-negara anggota untuk mematuhi norma dan aturan yang telah disepakati (Fidler, 2001).

Indikator keberhasilan rezim internasional dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain peningkatan kesehatan global yang diukur melalui peningkatan jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang memiliki akses terhadap antiretroviral (ARV). UNAIDS berperan dalam memfasilitasi pengadaan obat dan mendukung program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pengobatan (UNAIDS, 2021).

Dalam konteks HIV/AIDS di Afrika Selatan, keterlibatan UNAIDS sebagai bagian dari rezim internasional sangat penting. UNAIDS berperan dalam mengkoordinasikan upaya global untuk penanganan HIV/AIDS, menyediakan pedoman, dan mendukung negara-negara dalam implementasi program-program kesehatan. Keterlibatan ini mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan tenaga kesehatan, serta pengembangan kebijakan yang berbasis bukti untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Dengan adanya dukungan dari UNAIDS dan WHO, Afrika Selatan dapat memperkuat

sistem kesehatan nasionalnya dan meningkatkan respons terhadap epidemi HIV/AIDS.

2. Teori *Human Security*

Menurut Tella (2022) *human security* merupakan kesejahteraan individu yang mencakup perlindungan dari ancaman yang muncul dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan manusia tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga isu-isu yang lebih luas yang mempengaruhi kualitas hidup individu (Tella, 2022).

Kemudian Augustian mengemukakan bahwa *human security* adalah paradigma baru yang penting dalam studi hubungan internasional, yang mencakup isu-isu kemanusiaan yang lebih strategis dan lebih luas daripada keamanan tradisional. Ini menunjukkan bahwa pendekatan *human security* berupaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu dan komunitas dalam konteks yang lebih holistik (Augustian, 2020).

Adapun penjelasan yang menyebutkan bahwa *human security* adalah konsep yang menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Ini mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan manusia harus dilihat dari perspektif yang lebih luas daripada sekedar keamanan negara (Mumtazinur, 2023).

Implementasi teori *human security* secara umum berfokus pada perlindungan individu dan komunitas dari berbagai ancaman yang dapat

mengganggu kesejahteraan mereka. Dalam konteks global, *human security* berusaha untuk menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi individu, dengan menyadari bahwa ancaman terhadap keamanan tidak hanya muncul dari konflik bersenjata, tetapi juga dari kemiskinan, ketidakadilan, dan masalah lingkungan (Tella, 2022). WHO memiliki peran yang krusial dalam penerapan *human security*. WHO mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, yang merupakan elemen penting dari keamanan manusia. Teori *Human Security* juga mencakup perhatian terhadap faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan. WHO berupaya untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya lainnya (Ilmi Tella, 2023).

Keberhasilan implementasi teori *human security* dapat diukur melalui pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS, yang merupakan indikator penting dalam konteks *human security*. Stigma yang melekat pada HIV/AIDS seringkali menyebabkan individu merasa terisolasi dan enggan untuk mencari pengujian atau perawatan yang mereka butuhkan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, UNAIDS berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif melalui kampanye kesadaran dan advokasi. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap HIV/AIDS dengan menyebarkan informasi yang akurat dan berbasis bukti, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak, UNAIDS berhadapan dapat menciptakan pendekatan yang holistik dan

berkelanjutan dalam mengatasi stigma (Herek, 2009). Perubahan sikap masyarakat dan peningkatan dukungan terhadap individu yang terinfeksi HIV dapat mencerminkan keberhasilan dalam mengatasi stigma, yang merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan manusia. Ketika masyarakat mulai melihat orang yang hidup dengan HIV/AIDS sebagai individu yang berhak mendapatkan dukungan dan perawatan, bukan sebagai sumber ancaman, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam cara mereka diperlakukan. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan akses ke layanan kesehatan, pengurangan angka infeksi baru, dan peningkatan kualitas hidup bagi mereka yang terinfeksi. Dengan demikian, upaya UNAIDS dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS tidak hanya bermanfaat bagi individu tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempererat kohesi sosial dan meningkatkan keamanan manusia secara keseluruhan.

Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan, UNAIDS membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara individu dan komunitas. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HIV/AIDS, serta mengurangi stigma yang seringkali menghalangi orang untuk mencari perawatan. Dalam konteks Afrika Selatan, di mana ketidaksetaraan ekonomi dan sosial masih menjadi tantangan besar, UNAIDS bekerja sama dengan WHO, serta pemerintah dan organisasi lokal untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen

prinsip *human security* yang menekankan perlunya mengatasi faktor-faktor yang mendasari ketidakamanan kesehatan.

WHO juga terlibat dalam penanganan HIV/AIDS bersama dengan UNAIDS dapat dilihat dari peningkatan akses terhadap pengobatan antiretroviral (ART) dan layanan pencegahan. Serta mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pengobatan dan mengurangi angka infeksi baru. Dengan demikian, UNAIDS berkontribusi pada pencapaian tujuan *human security*, yaitu memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Secara keseluruhan, keterlibatan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan selama 2016-2024 menunjukkan bagaimana teori *human security* dapat diimplementasikan dalam konteks kesehatan. Dengan fokus pada perlindungan individu dan komunitas, UNAIDS bersama WHO berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (United Nations Development Programme, 2021).

3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian oleh Kurnianto (2021) dalam skripsi berjudul “Peran The Joint United Programme on HIV/AIDS dalam Penanganan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Kenya tahun 2015-2019” penulis telah menganalisis peran UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS di Kenya selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa UNAIDS berfungsi sebagai instrumen, arena dan aktor

independen dalam upaya mengatasi epidemi HIV/AIDS yang telah menjadi masalah serius di negara tersebut. Melalui berbagai program yang dijalankan bersama pemerintah Kenya, UNAIDS berhasil mengimplementasikan inisiatif yang tidak hanya fokus kepada pengobatan, tetapi juga edukasi dan penghapusan stigma terhadap orang yang terinfeksi HIV. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani isu kesehatan global. UNAIDS, sebagai organisasi internasional, telah berhasil memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara negara-negara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan HIV/AIDS.

Di penelitian lain oleh Asri et al. (2021) dalam penelitian yang berjudul “Peran United Nations Joint Program on HIV/AIDS (UNAIDS) terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS di Zimbabwe” menegaskan bahwa UNAIDS memiliki peran yang signifikan dalam upaya penurunan tingkat penderita HIV/AIDS di Zimbabwe. Melalui kerjasama dengan pemerintah Zimbabwe, UNAIDS telah memberikan bantuan teknis, pendanaan, dan dukungan dalam bentuk program-program kesehatan yang terintegrasi. Keberadaan UNAIDS sebagai organisasi internasional telah membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih baik dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di negara tersebut. Prevalensi HIV di Zimbabwe mengalami penurunan signifikan, dari 26,5% pada tahun 1997 menjadi 14% pada tahun 2009. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh intervensi UNAIDS, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk LSM dan sektor swasta. Meskipun ada kemajuan, penelitian ini

juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Zimbabwe. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterbatasan sumber daya manusia, dan tantangan budaya dalam menerima perubahan menjadi kendala yang harus diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, peran UNAIDS di Kenya dan Zimbabwe dengan menyoroti bagaimana UNAIDS berkolaborasi menjalankan program dengan pemerintah di Kenya dan Zimbabwe. Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana dampak keterlibatan UNAIDS dalam perkembangan penanganan HIV/AIDS di kawasan Afrika Selatan serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh UNAIDS dalam mengimplementasikan programnya di kawasan Afrika Selatan. Dengan menggunakan kerangka teori rezim internasional dan teori *human security*, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan global dan keamanan manusia saling berinteraksi dalam konteks penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran UNAIDS mempengaruhi respons terhadap epidemi HIV/AIDS, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan

keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi program-program kesehatan di lapangan. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas program, seperti stigma sosial, akses terhadap layanan kesehatan, efektifitas layanan pengobatan HIV/AIDS serta perkembangan penanganan pada tahun 2016-2024. Dengan pendekatan kualitatif-analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak keterlibatan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder ini mencakup jurnal akademik, buku, dokumen kebijakan pemerintah serta artikel media yang memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami situasi kesehatan di Afrika Selatan. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang dihadapi oleh pengidap HIV/AIDS di Afrika Selatan serta perkembangan penanganan pada tahun 2016-2024. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi selama periode 2016 hingga 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber tertulis seperti jurnal akademik, buku, dokumen pemerintah, dan artikel media. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan dampak keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024. Sumber-sumber tersebut akan digunakan untuk menganalisis kebijakan serta efektivitas program terkait.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data dan fakta yang kemudian diolah yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai dampak keterlibatan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan pada tahun 2016-2024.

5. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dengan merumuskan hipotesis berdasarkan teori dan literatur yang ada mengenai peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kesehatan. Kemudian mengumpulkan data yang relevan untuk menguji hipotesis tersebut. Setelah data terkumpul, metode analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengevaluasi perubahan dalam akses, efektivitas program, perkembangan

penanganan serta kualitas layanan kesehatan dengan keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan kesehatan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Rezim Internasional

Rezim internasional merujuk pada seperangkat aturan, norma, dan praktik yang mengatur interaksi antara negara-negara dan aktor internasional lainnya dalam suatu bidang tertentu, seperti keamanan, perdagangan, lingkungan, atau kesehatan. Rezim ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang bersifat transnasional.

Stephen D. Krasner, dalam bukunya *International Regimes* (1983), mendefinisikan rezim internasional sebagai “kumpulan prinsip, norma, aturan, dan keputusan yang mengatur perilaku aktor dalam suatu bidang tertentu.” Menurut Krasner, rezim internasional berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan antar negara. Dengan adanya rezim, negara-negara dapat berkolaborasi untuk mengatasi masalah yang bersifat transnasional, seperti perdagangan, lingkungan, dan kesehatan global. Krasner juga menekankan bahwa rezim internasional tidak hanya terbatas pada perjanjian formal, tetapi juga mencakup norma-norma dan praktik yang berkembang seiring waktu. Ia berargumen bahwa keberhasilan rezim tergantung pada komitmen negara-negara untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi global. Dengan demikian, rezim internasional memainkan peran penting dalam memainkan peran penting

dalam mengatur interaksi antar negara dan memfasilitasi kerjasama (Krasner, 1983).

Robert Keohane, dalam karyanya *After Hegemony* (1984), berargumen bahwa rezim internasional memiliki peran krusial dalam menciptakan kerjasama di antara negara-negara, meskipun tidak ada kekuatan hegemonik yang dominan. Ia menyatakan bahwa institusi internasional dapat membantu negara-negara untuk mengatasi masalah kolektif dengan menyediakan aturan dan norma yang jelas. Keohane menekankan bahwa kerjasama dapat terjadi bahkan dalam situasi di mana kepentingan nasional tidak sepenuhnya sejalan, asalkan ada mekanisme yang memfasilitasi interaksi. Keohane juga menggarisbawahi pentingnya pengaruh institusi dalam membentuk perilaku negara. Ia berpendapat bahwa institusi internasional dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan di antara negara-negara, sehingga memudahkan mereka untuk berkolaborasi dalam isu-isu global. Dengan demikian, rezim internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan kooperatif diantara negara-negara (Keohane, 1984).

Oran R. Young mengemukakan bahwa rezim internasional terdiri dari “aturan, norma, dan prosedur yang mengatur interaksi antar negara dalam suatu isu tertentu.” Dalam pandangannya, rezim internasional berfungsi untuk mengelola masalah kolektif dan menciptakan kerjasama diantara negara-negara. Young menekankan bahwa keberhasilan rezim sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua aktor, termasuk negara dan organisasi non-pemerintah, dalam

proses pembentukan dan pemeliharaan norma-norma internasional. Young juga menyoroti pentingnya konteks sosial dan politik dalam memahami rezim internasional. Ia berargumen bahwa rezim tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan negara, tetapi juga oleh dinamika sosial yang lebih luas, termasuk nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat. Dengan demikian, analisis rezim internasional harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi antar aktor di tingkat global (Young, 1999).

John Ruggie berpendapat bahwa rezim internasional tidak hanya mencakup aturan dan norma, tetapi juga melibatkan proses sosial yang membentuk interaksi antar aktor. Dalam pandangannya, rezim dapat berfungsi sebagai arena dimana negara-negara dapat bernegosiasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ruggie menekankan bahwa pemahaman tentang rezim internasional harus mencakup konteks historis dan sosial yang mempengaruhi pembentukan norma-norma global. Ruggie juga menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dalam rezim internasional. Ia berargumen bahwa untuk mencapai hasil yang efektif, semua aktor, termasuk negara-negara kecil dan aktor non-negara, harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, rezim internasional harus dirancang untuk menciptakan ruang bagi partisipasi yang lebih luas, sehingga dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak (Ruggie, 1998).

David P. Forsythe menyatakan bahwa rezim internasional dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah global yang kompleks, seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Ia berargumen bahwa rezim internasional dapat

membantu menciptakan konsensus di antara negara-negara dan memfasilitasi tindakan kolektif. Menurutnya, keberhasilan rezim internasional tergantung pada komitmen negara-negara untuk mematuhi aturan dan norma yang telah disepakati. Forsythe juga menekankan bahwa rezim internasional harus responsif terhadap perubahan kondisi global dan tantangan baru yang muncul. Ia berpendapat bahwa untuk tetap relevan, rezim harus mampu beradaptasi dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat internasional yang terus berkembang. Dengan demikian, analisis rezim internasional harus mempertimbangkan dinamika yang kompleks dan beragam dalam sistem internasional (Forsythe, 2006).

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) merupakan organisasi internasional yang memiliki peran sentral dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di seluruh dunia, termasuk Afrika Selatan. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana UNAIDS beroperasi dalam kerangka teori rezim internasional. Teori ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional dalam mengatasi masalah kesehatan global yang kompleks.

Teori rezim internasional, seperti yang dijelaskan oleh Krasner (1983), mencakup kumpulan prinsip, norma, aturan, dan keputusan yang mengatur perilaku aktor dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, UNAIDS berfungsi sebagai rezim internasional yang mengkoordinasikan upaya global untuk mengatasi epidemi HIV/AIDS. UNAIDS tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan, tetapi juga fasilitator yang menciptakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam upaya penanggulangan

HIV/AIDS. Melalui pedoman strategis dan dukungan teknis yang diberikan, UNAIDS mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menyediakan layanan HIV yang dapat menyelamatkan nyawa.

Salah satu aspek penting dari keterlibatan UNAIDS adalah kemampuannya untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota. Dalam konteks Afrika Selatan, dimana prevalensi HIV sangat tinggi, UNAIDS berperan dalam menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan memfasilitasi dialog antara negara-negara anggota, UNAIDS membantu mengatasi masalah kolektif yang dihadapi dalam penanganan HIV/AIDS. Hal ini sejalan dengan pandangan Keohane (1984) yang mempertahankan rezim yang dapat mengatasi masalah kolektif. UNAIDS juga berupaya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Dalam kerangka teori rezim internasional, UNAIDS berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong perubahan sosial dan budaya yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Melalui kampanye kesadaran dan advokasi, UNAIDS berusaha untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap HIV/AIDS, sehingga individu yang terinfeksi merasa lebih nyaman untuk mencari perawatan.

Di Afrika Selatan, dimana tantangan kesehatan masyarakat sangat kompleks, keterlibatan UNAIDS menjadi semakin krusial. UNAIDS berkolaborasi dengan pemerintah Afrika Selatan untuk meluncurkan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap

pengobatan dan pencegahan. Melalui pendekatan berbasis rezim internasional, UNAIDS tidak hanya berfokus pada aspek medis dari penanganan HIV/AIDS, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, UNAIDS berkontribusi pada pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya dalam mengakhiri epidemi HIV/AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 (UNAIDS, 2024). Keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS di Afrika Selatan selama periode 2016-2024 menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat berfungsi sebagai rezim yang efektif dalam mengatasi tantangan kesehatan global.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan dengan menggunakan teori rezim internasional sebagai salah satu kerangka analisis. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma, aturan, dan institusi internasional berfungsi dalam mengatur perilaku negara dan organisasi internasional dalam menghadapi masalah global, termasuk kesehatan masyarakat. Salah satu tujuan utama dari penggunaan teori rezim internasional adalah untuk memahami bagaimana UNAIDS, sebagai aktor internasional, berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi antara pemerintah Afrika Selatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan HIV/AIDS. Dengan menganalisis kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh UNAIDS, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana

norma-norma internasional terkait kesehatan dan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional Afrika Selatan.

Selain itu, teori rezim internasional juga memungkinkan penulis untuk menganalisis dinamika interaksi antara aktor-aktor internasional dan domestik dalam konteks penanganan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana keterlibatan UNAIDS tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang efektif, tetapi juga mempengaruhi kapasitas dan respons sistem kesehatan di Afrika Selatan. Dengan demikian, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana rezim internasional dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Melalui pendekatan ini, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di Afrika Selatan tentang bagaimana memperkuat kerjasama internasional dalam penanganan HIV/AIDS. Dengan memahami peran dan dampak keterlibatan UNAIDS dalam konteks rezim internasional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan dan meningkatkan efektivitas program-program kesehatan masyarakat di masa depan.

B. Teori Human Security

Teori *Human Security* adalah pendekatan yang menekankan perlindungan individu dan komunitas dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada keamanan negara dan ancaman militer, teori *human security* memperluas

definisi keamanan untuk mencakup berbagai dimensi, termasuk kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Tella (2022) mendefinisikan *human security* sebagai kesejahteraan individu yang mencakup perlindungan dari ancaman yang muncul dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan manusia tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga isu-isu yang lebih luas yang mempengaruhi kualitas hidup individu (Tella, 2022).

Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan bahwa teori *human security* berfokus pada perlindungan individu dari ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Ia menekankan bahwa keamanan manusia harus menjadi prioritas dalam agenda global, dan bahwa pendekatan ini harus melibatkan berbagai dimensi, termasuk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan (Annan, 1999).

Sen (1999) berargumen bahwa teori *human security* berkaitan dengan kebebasan individu untuk hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Ia menekankan pentingnya mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keamanan manusia (Sen, 1999).

Kaldor (2007) mengemukakan bahwa teori *human security* mencakup perlindungan individu dari kekerasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Ia menekankan bahwa keamanan manusia harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Kaldor, 2007).

Goldstone (2003) mendefinisikan teori *human security* sebagai pendekatan yang menekankan perlindungan individu dari pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan ancaman terhadap kehidupan. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks keamanan manusia (Goldstone, 2003).

Epidemi HIV/AIDS di kawasan Afrika, khususnya di Afrika Selatan, merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan dan kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memahami keterkaitan antara epidemi HIV/AIDS dan konsep *human security*, yang menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Di dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS berkontribusi pada peningkatan *human security* di kawasan tersebut. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Tella (2022), *human security* mencakup kesejahteraan individu yang meliputi perlindungan dari ancaman yang muncul dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks HIV/AIDS, ancaman terhadap *human security* sangat nyata, mengingat bahwa infeksi HIV tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik individu, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi kehidupan mereka. Di Afrika Selatan dampak dari epidemi ini sangat luas, mencakup peningkatan angka kematian, stigma sosial, dan penurunan produktivitas ekonomi.

UNAIDS sebagai organisasi yang berfokus pada penanganan HIV/AIDS, berperan penting dalam meningkatkan *human security* di Afrika Selatan. Melalui

berbagai program dan inisiatif, UNAIDS berupaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV, serta meningkatkan akses terhadap pengobatan antiretroviral (ART). Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengobatan dan pencegahan, UNAIDS membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu yang terinfeksi. Kampanye “U=U” (*undetectable = untransmittable*) adalah salah satu contoh inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pengobatan dapat mengurangi penularan HIV, sehingga memberikan harapan dan meningkatkan kualitas hidup bagi orang yang hidup dengan HIV (UNAIDS, 2022).

Keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS juga mencakup perhatian terhadap faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. UNAIDS tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga berupaya untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Dengan bekerja sama dengan pemerintah Afrika Selatan dan berbagai pemangku kebijakan, UNAIDS berkontribusi dalam menciptakan kebijakan dan mendukung pengembangan sistem kesehatan yang lebih kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang paling rentan, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif.

Epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan manusia secara keseluruhan. Penyebaran HIV tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan

ekonomi negara. Penurunan produktivitas akibat tingginya angka kematian terkait HIV dapat menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pemerintah. Dalam hal ini, UNAIDS berperan sebagai agen perubahan yang membantu mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, dan memfasilitasi akses terhadap pengobatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan melalui konsep *human security*. Teori ini dipilih karena fokusnya yang holistik terhadap kesejahteraan individu, yang mencakup perlindungan dari berbagai ancaman, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana keterlibatan UNAIDS tidak hanya berkontribusi pada pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpengaruh oleh epidemi ini. Salah satu tujuan utama dari penggunaan teori *human security* adalah untuk menganalisis bagaimana program-program yang diimplementasikan oleh UNAIDS dapat meningkatkan akses individu terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pengobatan antiretroviral dan layanan pencegahan HIV/AIDS, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana

pendekatan *human security* dapat diterapkan dalam konteks penanganan epidemi HIV/AIDS.

Teori ini juga memungkinkan penulis untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penyebaran HIV/AIDS mempengaruhi keamanan manusia secara keseluruhan, termasuk dampaknya terhadap ketahanan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan memahami hubungan antara epidemi HIV/AIDS dan keamanan manusia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan respons terhadap kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program-program UNAIDS. Teori *human security* menekankan perlunya partisipasi aktif individu dan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program penanganan HIV/AIDS dan menciptakan rasa kepemilikan diantara individu yang terpengaruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pendekatan berbasis masyarakat dapat memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kebijakan yang diambil oleh UNAIDS dan pemerintah Afrika Selatan dalam penanganan HIV/AIDS dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu yang terpengaruh. Teori *human security* menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang mendukung

bagi individu untuk hidup dengan aman dan sejahtera. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam mengurangi risiko dan meningkatkan perlindungan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menilai dampak dari program-program UNAIDS terhadap pengurangan angka kematian dan morbiditas yang terkait dengan HIV/AIDS. Dengan pendekatan *human security*, penulis berharap dapat menunjukkan bagaimana akses yang lebih baik terhadap pengobatan dan layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan mengurangi beban sosial yang ditimbulkan oleh epidemi ini. Kemudian, penelitian ini juga akan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program UNAIDS di Afrika Selatan. Teori *human security* memberikan kerangka untuk memahami berbagai hambatan yang mungkin menghalangi akses individu terhadap layanan kesehatan, termasuk stigma, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan kesehatan di Afrika Selatan dengan mengintegrasikan perspektif *human security*. Dengan menganalisis dampak keterlibatan UNAIDS dalam konteks keamanan manusia, penulis berharap dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan respons terhadap epidemi HIV/AIDS.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan memaparkan hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian kualitatif sebelumnya dengan topik dampak

keterlibatan UNAIDS dalam penanganan epidemi HIV/AIDS. Hal ini dilakukan agar penulis memperoleh referensi yang lebih mendalam sekaligus memperjelas aspek pembeda dari penelitian yang dilakukan. Secara spesifik pemaparan berikut akan berfokus pada hasil temuan yang menggambarkan bagaimana UNAIDS berperan dalam pelaksanaan program-program yang diimplementasikan maupun tidak langsung melalui kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lokal.

Penelitian oleh Nurul Anisa Basri, Muhammad Nasir Badu, Pusparida Syahdan (2021) yang berjudul “Peranan *United Nations Joint Program On HIV/AIDS* (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS di Zimbabwe” berfokus pada peranan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS di Zimbabwe. Penelitian ini turut memberikan wawasan penting dalam memahami bagaimana keberhasilan program UNAIDS sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang kuat antara organisasi internasional dan pemerintah nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi HIV di Zimbabwe menurun cukup signifikan berkat integrasi program-program UNAIDS dalam kebijakan lokal. Penulis menilai bahwa studi ini mampu menggambarkan peran UNAIDS secara konkrit dalam mendukung sistem kesehatan nasional, terutama dalam aspek pendanaan, edukasi, serta pengadaan obat-obatan. Namun, meskipun informatif, penelitian ini belum banyak mengeksplorasi bagaimana konteks sosial seperti stigma, budaya lokal, atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas dari intervensi yang dilakukan, yang sebenarnya merupakan isu penting dalam memahami keberlanjutan suatu program kesehatan. Penelitian ini secara spesifik meneliti tantangan sosial dan budaya yang dihadapi UNAIDS dalam implementasi

programnya di Zimbabwe. Dari sudut pandang penulis, kekuatan dari penelitian ini terletak pada sensitivitasnya dalam membaca hambatan-hambatan sosial seperti stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dan rendahnya penerimaan masyarakat terhadap layanan medis modern. Namun, kajian ini belum secara langsung mengaitkan temuan-temuannya dengan kerangka teoritis hubungan internasional, sehingga pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif.

Penelitian lain oleh Rifqi Novaldo Asriagi Kurnianto (2021) yang berjudul “Peran The United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dalam Penanganan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Kenya tahun 2015-2019” berfokus pada penanganan HIV/AIDS di Kenya selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana UNAIDS berkontribusi dalam mengurangi angka infeksi HIV di Kenya melalui berbagai program dan inisiatif yang dilaksanakan bersama pemerintah Kenya. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dan peran organisasi internasional dari Clive Archer untuk menganalisis peran UNAIDS sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam konteks penanganan HIV/AIDS di Kenya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNAIDS telah berperan sebagai instrumen yang efektif dalam melaksanakan program-program bersama dengan pemerintah Kenya. Melalui berbagai inisiatif, UNAIDS membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS, menyediakan akses pengobatan antiretroviral, dan mengembangkan strategi pencegahan yang komprehensif. Penelitian ini mencatat bahwa jumlah kasus HIV

di Kenya mengalami penurunan yang konsisten setiap tahunnya, yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara UNAIDS dan pemerintah dalam menangani epidemi ini. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan HIV/AIDS di Kenya. Stigma sosial terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS masih menjadi hambatan utama, yang mengakibatkan banyak individu enggan untuk mendapatkan pengujian dan perawatan. Selain itu, kurangnya sumber daya dan infrastruktur kesehatan yang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi program-program UNAIDS. Dalam penelitiannya, Kurnianto menjelaskan bahwa UNAIDS berperan sebagai aktor internasional yang menjalankan fungsinya melalui pendekatan sebagai instrumen, arena, dan pelaku independen dalam menangani epidemi HIV di Kenya. Dari sudut pandang penulis, kontribusi utama dari penelitian ini adalah kemampuannya dalam menunjukkan bahwa UNAIDS bukan hanya sekadar organisasi donor atau pelaksana program, tetapi juga memiliki kekuatan struktural dalam membentuk arah kebijakan kesehatan suatu negara. Namun, penelitian ini cenderung belum memberikan penekanan yang kuat terhadap dimensi teoritis atau konseptual, khususnya dalam memahami keterkaitan antara intervensi UNAIDS dengan konsep keamanan manusia (human security) yang lebih luas.

Dari peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan adanya ruang kosong atau celah (gap) yang belum terisi dalam kajian ilmiah mengenai keterlibatan UNAIDS dalam penanganan HIV/AIDS, khususnya di Afrika Selatan. Tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang secara spesifik

dan komprehensif mengkaji dampak keterlibatan UNAIDS di Afrika Selatan pada periode 2016 hingga 2024. Padahal, Afrika Selatan merupakan negara dengan beban epidemi HIV/AIDS tertinggi di dunia dan menjadi salah satu fokus utama kerja UNAIDS secara global. Belum adanya studi terdahulu yang mengaitkan peran UNAIDS di Afrika Selatan dengan teori rezim internasional dan human security juga menjadi celah penting yang coba diisi dalam skripsi ini.

Penelitian ini berusaha menjawab kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana program-program UNAIDS, seperti “She Conquers”, PMTCT, U=U, dan telemedicine, bukan hanya mempengaruhi aspek teknis dalam pengobatan HIV/AIDS, tetapi juga membawa perubahan dalam aspek sosial dan keamanan manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan tradisi akademik yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi juga memperluasnya melalui pendekatan teoritis yang lebih terintegrasi dan cakupan wilayah yang belum banyak dibahas secara akademis. Melalui pendekatan ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih kuat dalam studi hubungan internasional dan kesehatan global, serta menjadi referensi yang relevan bagi upaya penguatan program kesehatan di Afrika Selatan dan negara-negara dengan kondisi serupa di masa mendatang.